

Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Palu

Dahlia Safitri^{1*}; Asrifai², Rusmawaty Bte Rusdin³

¹ Universitas Tadulako, dahliasafitri@gmail.com

² Universitas Tadulako,

³ Universitas Tadulako,

*Correspondence : dahliasafitri06@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator

Received. : 19 Juli

Revised. : 22 Juli

Accepted : 25 Juli

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana mengevaluasi keberhasilan Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Palu. Dalam penelitian ini menggunakan teori Ryaas Rasyid (2010) dalam Muhadam Labollo tentang Peran Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan peran pemerintah melalui peran pemerintah sebagai Regulator, peran pemerintah Dinamisator, dan peran pemerintah sebagai Fasilitator. Meskipun terdapat satu peran pemerintah yang belum berhasil ialah peran pemerintah sebagai katalisator karena adanya kendala mengenai pemahaman Pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi serta memasarkan produk yang mereka miliki. Namun strategi peran pemerintah dalam memberikan pelatihan dan juga bantuan berupa modal usaha telah memberikan peluang bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Dampak positif dapat terlihat dalam pemberdayaan pelaku UMKM yang telah di berikan pelatihan serta sosialisasi tentang pengembangan UMKM. Saran yang meliputi tentang bagaimana pemerintah kota palu untuk mensosialisasikan lebih dalam terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi dalam akses pemasaran produk yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Sehingga dalam mewujudkan peran pemerintah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

ABSTRACT

This research aims to describe how to evaluate the success of the Palu City Government's role in empowering UMKM in Palu City. This research uses the theory of Ryaas Rasyid (2010) in Muhadam Labollo on the Role of Government. This research uses a qualitative research approach with descriptive research type. Data collection techniques use observation, interview and documentation techniques. The research results show the success of the government's role through the government's role as a regulator, the government's role as a dynamist, and the government's role as a facilitator. Although there is one role of government that has not been successful, namely the role of government as a catalyst because there are obstacles regarding the understanding of UMKM actors in utilizing technology and marketing the products they have. However, the government's strategic role in providing training and also assistance in the form of business capital has provided opportunities for business actors who want to develop their businesses. The positive impact can be seen in the empowerment of UMKM actors who have been given training and outreach regarding UMKM development. Suggestions include how the Palu City

government can disseminate more information regarding how to utilize technology in marketing access to products owned by UMKM players. So, in realizing the government's role, it is hoped that it can provide benefits for UMKM in developing their businesses.

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kategori bisnis berskala kecil yang dianggap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 1988, banyak usaha besar di berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa mengalami stagnasi atau bahkan berhenti beroperasi. Namun, UMKM berhasil bertahan dan memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi di tengah krisis moneter. Pembinaan dan pemberdayaan UMKM memerlukan perhatian yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan antara pihak-pihak yang sudah maju dengan yang belum berkembang. Saat ini, jumlah UMKM mencapai 64,16 juta, menyumbang 61,97% terhadap PDB dengan nilai sebesar 8.573,89 triliun rupiah. UMKM juga berperan besar dalam perekonomian Indonesia dengan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi. (Anugerah & Nuraini, 2021).

Dalam konteks ini, pembinaan usaha kecil yang disertai dengan penguatan kelembagaan masyarakat akan menghasilkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pembinaan usaha kecil juga berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya ini dapat memperbaiki kapasitas dan kualitas produksi serta keterampilan teknis pengusaha kecil, akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan koperasi, UMKM, serta tenaga kerja. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja memiliki fungsi dalam hal pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pembangunan di bidang koperasi. Program pemerintah Kota Palu oleh Dinas

Sosial dan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja berakar dari masalah yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kendala utama mereka dalam mengembangkan usaha adalah kesulitan dalam pemasaran dan promosi produk, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi yang belum dipahami oleh semua orang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Palu, melalui Dinas Sosial serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, menjalankan perannya. Peran pemerintah terbagi dalam empat kategori: sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator (Ryaas Rasyid & Muhadam Labollo, 2010).

Dari keempat peran pemerintah tersebut, peneliti akan membahas peran pemerintah dalam akses pemasaran sebagai katalisator. Peran pemerintah Kota Palu sebagai katalisator dalam pengembangan UMKM adalah untuk mempercepat pertumbuhan UMKM. Untuk menjalankan peran ini, pemerintah mengambil berbagai langkah, seperti pemberdayaan komunitas kreatif agar lebih produktif daripada konsumtif, memberikan penghargaan kepada UMKM, menyediakan prasarana intelektual untuk UMKM (seperti perlindungan hak kekayaan intelektual), serta menyediakan pemodal, termasuk modal ventura atau modal bergulir. Selain itu, pemerintah berfungsi sebagai penghubung untuk pertumbuhan potensi antar daerah, yang pada akhirnya dapat menjadi modal sosial untuk menciptakan jaringan bagi pelaku UMKM dan membantu mereka dalam memperluas pasar (Anggara & Sumantri, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian maka data yang diperoleh, jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palu terbagi menurut jenis usaha sebagai berikut: Kerajinan sebanyak 129 orang, Barang Campuran 10.488 orang, Kuliner 13.039 orang, Obat-obatan 69 orang, Jasa 4.672 orang, Fashion, Kecantikan, dan Pakaian 838 orang, serta Rempah-rempah 326 orang. Total keseluruhan pelaku UMKM di Kota Palu adalah sekitar 29.561 orang. Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, sebagai lembaga pemerintah daerah, berfokus pada pemberdayaan UMKM dengan

memberikan dukungan dalam bentuk teknologi tepat guna, pemodalan, pelatihan pemasaran produk, pendampingan UMKM, serta pelatihan pengorganisasian. Tujuannya adalah agar UMKM menjadi mandiri, kreatif, produktif, serta mampu memajukan perekonomian daerah, khususnya Kota Palu, dan diharapkan dapat berkembang hingga mencapai pasar lokal maupun ekspor.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah di antaranya dilakukan oleh penelitian Muhammad Rafiq sebelumnya, yang diterbitkan pada tahun (2015) mengenai Upaya Dinas Koperasi memajukan UMKM di Kota Palu, begitu juga dengan tenaga kerja di Kota Kut Palu dan UMKM itu sendiri." Penelitian tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan secara maksimal, berdasarkan penerapan teori (Harimurti Subanar,2009) mengenai manajemen usaha kecil dan menengah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Safitri mengacu pada teori (Ryaas Rasyi,2010) mengenai peran pemerintah sebagai Regulator, dinamisator,Fasilitator dan Katalisator yang berfokus pada mendorong partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam mengarahkan dan memotivasi pelaku usaha. Penelitian M. Ibnu Fadhil (2017) mengungkapkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM di Kota Bandar Lampung dalam memberdayakan pedagang kaki lima belum berhasil sesuai harapan. Fokus pemberdayaan dari dinas tersebut lebih diarahkan pada usaha-usaha kreatif yang sudah memiliki kepastian dalam kegiatan usaha mereka, sementara pedagang kaki lima belum menjadi prioritas utama dalam pemberdayaan. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian Dahlia Safitri menunjukkan bahwa dari empat peran pemerintah, tiga di antaranya telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja. Peran-peran tersebut termasuk sebagai fasilitator dengan menyediakan modal, pelatihan, dan sosialisasi; sebagai regulator dalam penetapan dan implementasi kebijakan untuk UMKM; serta sebagai dinamisator dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mengarahkan pelaku usaha. Namun, peran pemerintah sebagai katalisator dalam akses pemasaran belum sepenuhnya efektif,

disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai penggunaan teknologi dalam pemasaran produk mereka.

Berdasarkan kerangka teoritis pengertian peranan maka ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan berbagai sudut pandang, Tugas pemerintah dalam masyarakat adalah membimbing masyarakat agar mandiri dan tumbuh untuk tujuan menghasilkan kesejahteraan, maka dari itu di perlukan adanya peran pemerintah secara optimal dan mendalam dengan tujuan membangun masyarakat (Iyas,2014). Peran pemerintah yang dimaksud ialah Menurut Ryaas Rasyid (2010) dalam Muhamadam Labolo ialah sebagai berikut :

a) Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator melibatkan penetapan arahan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah menyediakan pedoman dasar bagi masyarakat sebagai alat untuk mengatur berbagai aktivitas pemberdayaan.

b) Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah mendorong partisipasi masyarakat ketika menghadapi hambatan dalam proses pembangunan untuk menjaga dan meningkatkan dinamika pembangunan daerah. Dalam perannya ini, pemerintah memberikan bimbingan dan arahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan tersebut sering kali dilakukan melalui tim penyuluh atau lembaga tertentu yang bertugas memberikan pelatihan.

c) Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator melibatkan penciptaan suasana yang mendukung pelaksanaan pembangunan dengan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, pemerintah terlibat dalam pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dalam bidang pendanaan dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang

diberdayakan.

d) Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Katalisator, pemerintah sebagai katalisator berperan sebagai agen yang menunjang percepatan pengembangan potensi yang kemudian dapat menjadi model sosial untuk membangun partisipasi masyarakat.

Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat atau membantu mereka dalam memenuhi perannya. Peran terbaik pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor. Khususnya ketersediaan sarana dan prasarana, pendanaan, kemitraan, dan partisipasi masyarakat (Suhroh, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran pemerintah Kota Palu dalam memberdayakan UMKM di kota palu. Analisis ini mengacu pada teori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (2010) seperti yang diuraikan dalam Muhadam Labollo.

Metode

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik dari objek penelitian tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana berbagai informasi akan dikumpulkan hingga mencukupi untuk dianalisis sesuai dengan prosedur metodologi kualitatif. Oleh karena itu, penulis memilih pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah istilah yang mencakup berbagai teknik seperti observasi, wawancara partisipan, wawancara individu, dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data disebut *purposive sampling* Pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan yang terfokus pada tujuan penelitian tertentu, bukan berdasarkan pola acak, regional, atau bertingkat. Sehingga jumlah informan yang penulis tentukan ialah lima informan yang terdiri dari dua pihak Dinas Terkait dan tiga diantaranya dari pihak pelaku usaha UMKM yang penulis lihat mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.

Sehingga Melibatkan penelitian pustaka dan penelitian lapangan melalui metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis Milles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari empat tahap: Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Teknik-teknik ini bertujuan untuk memahami dan menggali informan, sehingga informasi yang diperoleh dapat diletakkan dalam konteks yang tepat (Marsh et al., 2021).

Result and Discussion / Hasil dan Pembahasan

Peran pemerintahan kota Palu mengenai penguatan dan peningkatan UMKM meliputi penyediaan bimbingan dan pengarahan bagi para pelaku UMKM, pengadaan atau bantuan modal, pengembangan jaringan pemasaran, fasilitasi program kemitraan antara UMKM dengan pihak lain, serta evaluasi terhadap konsekuensi program penguatan yang telah selesai. Sehingga gagasan dan peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM sama dengan peran pemerintah dalam masyarakat, yaitu memimpin masyarakat menuju kemandirian, pertumbuhan, dan kemakmuran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memainkan perannya secara penuh dan efektif dalam pembangunan masyarakat (Iyas, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat beberapa regulasi terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia. Namun, menjalankan UMKM di Sulawesi Tengah tidaklah mudah. Program pemberdayaan UMKM meliputi bimbingan, bantuan modal, pengembangan jaringan pemasaran, kemitraan, dan evaluasi hasil program. Peran pemerintah yang dimaksud ialah Menurut Ryaas Rasyid (2010) dalam Muhadam Labolo bahwa peran pemerintah dapat di wujudkan dengan sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator ialah sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah dalam menetapkan dan mengimplementasikan regulasi untuk

UMKM sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui kebijakan seperti peraturan mengenai perizinan, pajak, subsidi, dan pelatihan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan dengan efektif dengan memantau dan mengevaluasi dampaknya secara berkala. Misalnya, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja menetapkan pelaku usaha yang berhak menerima bantuan melalui Surat Keputusan Walikota, berdasarkan data hasil validasi dari incubator bisnis. Hal ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja. Regulator atau regulasi dalam konteks ini merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam menyediakan fasilitas dan memberdayakan UMKM untuk pengembangan usaha. Regulator itu sendiri adalah proses penetapan dan penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu untuk mendukung masyarakat dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Setiap program bantuan harus disertai dengan rancangan peraturan yang jelas, sehingga tim regulasi dapat menentukan peran Dinas Sosial dalam memberikan bantuan tunai kepada pelaku usaha. Salah satu syarat penerima bantuan adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tidak boleh sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Langkah konkret dari pemerintah melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, serta Dinas Sosial, sangat membantu dalam menentukan kelayakan penerima bantuan peralatan. Sebagaimana yang terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan peran koperasi serta UMKM dalam perekonomian nasional. Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan tersebut:

a) Kemudahan Akses : Mengatur tentang berbagai kemudahan yang diberikan

kepada koperasi dan UMKM dalam hal perizinan, permodalan, dan akses pasar. Ini termasuk penyederhanaan proses perizinan dan dukungan dari pemerintah untuk mempermudah akses ke sumber daya.

- b) Perlindungan Menyediakan perlindungan bagi koperasi dan UMKM agar mereka tidak terancam oleh praktik-praktik bisnis yang tidak adil. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak usaha, serta dukungan hukum untuk menghadapi persaingan yang tidak sehat.
- c) Pemberdayaan Fokus pada upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan akses ke teknologi. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas koperasi serta UMKM.
- d) pengembangan Infrastruktur: Mengatur tentang pengembangan infrastruktur yang mendukung koperasi dan UMKM, termasuk fasilitas produksi dan distribusi.
- e) Pendanaan dan Keuangan: Menyediakan mekanisme untuk meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap pendanaan, baik dari sumber dana pemerintah maupun swasta.
- f) Peran Pemerintah Daerah: Mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pengembangan koperasi dan UMKM di wilayahnya.
- g) Monitoring dan Evaluasi: Menetapkan sistem untuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap koperasi dan UMKM.

Peraturan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional serta memperkuat struktur ekonomi di tingkat lokal. Menurut teori Ryaas Rasyid (2010) yang diuraikan oleh Muhadam Labolo mengenai peran pemerintah sebagai regulator, pelaksanaan ini sudah sesuai dengan harapan. Peran pemerintah dalam penetapan dan implementasi bantuan UMKM sudah berjalan baik, dengan dukungan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, serta Dinas Sosial, sesuai dengan harapan mereka untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemerintah Kota Palu terus berupaya mendukung segala kegiatan pelaku usaha.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dinamisator dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah individu atau kelompok yang berperan aktif dalam mendorong perkembangan, inovasi, dan pertumbuhan UMKM. Peran dinamisator mencakup beberapa aspek Pengembangan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pemilik UMKM. Dari 3000 pendaftar yang telah terdata pelaku UMKM yang aktif hanya 442 orang yang usahanya berkembang dan mereka dibekali bantuan modal usaha 5 juta perorang dan diberikan pelatihan serta bimbingan kepada pelaku UMKM yang telah dikategorikan sebagai wirausaha pemula dengan usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Dalam berbagai aspek seperti manajemen, pemasaran, dan teknologi. Akses ke Sumber Daya: Membantu UMKM mengakses sumber daya yang diperlukan, seperti modal, bahan baku, dan jaringan bisnis. Inovasi dan Teknologi: Mendorong penggunaan teknologi baru dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran. Jaringan dan Kerjasama: Membantu UMKM membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Kebijakan dan Regulasi: Memfasilitasi pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta mendorong kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM. Dengan adanya dinamisator, UMKM dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas pasar mereka.

Peran Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja dalam peran pemerintah sebagai dinamisator adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha UMKM melalui peningkatan akses modal usaha berdasarkan data yang telah diperoleh 3000 pendaftar UMKM yang telah terdata tersebut mendapat bantuan Dana Usaha Sekitar 2 juta rupiah per orang dan bantuan tersebut dapat bertambah jumlahnya tergantung dari usaha yang dimiliki dapat berkembang ataupun tidak berkembang. Sehingga Dinas Sosial juga berperan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan menggerakkan, mengarahkan, dan mendukung

pengembangan usaha yang direncanakan oleh pelaku usaha. Selain itu, Dinas Sosial merancang program-program kesejahteraan sosial untuk mendukung UMKM. Berdasarkan teori Ryaas Rasyid (2010) yang diuraikan oleh Muhadam Labolo mengenai peran pemerintah sebagai dinamisator, pelaksanaan ini telah berjalan dengan baik. Hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, serta Dinas Sosial, menunjukkan bahwa pemerintah telah efektif dalam menjalankan perannya dan memberikan dukungan kepada masyarakat pelaku usaha.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Fasilitator dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menyediakan bantuan teknis dan pelatihan, mempermudah akses ke sumber daya dan modal, serta membantu dalam pengembangan jaringan pemasaran dan promosi. Selain itu, fasilitator juga memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Mereka berperan untuk memfasilitasi kerja sama antara UMKM dan berbagai pihak lain, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas lokal, guna mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja khususnya menyediakan dukungan yang melampaui aspek permodalan dengan menawarkan berbagai pelatihan. Pelatihan ini mencakup manajemen perusahaan, manajemen produksi, manajemen pembelian, dan berbagai aspek manajemen lainnya. Mengingat banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pembukuan yang memadai, pelatihan ini juga mencakup cara-cara sederhana dalam pencatatan transaksi dan perhitungan keuntungan serta kerugian. Program pelatihan yang diberikan oleh dinas ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM secara efektif.

Figure/ Gambar 1. Pelatihan Akses Modal Usaha & manajemen perusahaan



Source / Sumber : Arsip Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja memiliki mekanisme data berbasis perizinan untuk menilai kelayakan penerima bantuan, memastikan data yang valid. Pemerintah, melalui dinas tersebut, menyediakan fasilitas dengan syarat bahwa usaha harus memiliki yang juga menjamin kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, tim validasi dan verifikasi dari lembaga ekonomi inkubator bisnis yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palu turut berperan dalam proses ini. Dinas Sosial juga berkontribusi dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM, dengan fokus pada selektivitas dalam memberikan bantuan modal usaha dengan syarat bahwa calon penerima bantuan usaha harus terdaftar dalam pemeluk pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Wajib memiliki Nomor Induk Usaha (NIB), tidak boleh terdata sebagai penerima Program Penerima Keluarga Harapan (PKH), dan tidak boleh terdata sebagai penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), baik berupa uang tunai maupun peralatan, untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja serta Dinas Sosial, berperan sebagai fasilitator dengan tidak hanya memberikan bantuan modal dan peralatan, tetapi juga pelatihan mengenai pembukuan dan cara mengajukan bantuan dalam bentuk proposal. Berdasarkan teori Ryaas Rasyid (2010) dalam Muhadam Labolo, peran pemerintah sebagai fasilitator telah berjalan sesuai harapan dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM. Pemerintah Kota Palu

berkomitmen untuk mendukung berbagai kegiatan pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, dengan berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM, memastikan bahwa dukungan yang diberikan efektif dan tepat sasaran.

4. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Pemerintah berperan sangat penting dalam mendukung akses pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai katalisator, Membantu dalam promosi dan branding produk lokal melalui kampanye nasional dan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan permintaan terhadap produk UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berperan sebagai katalisator yang mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, serta membantu mereka untuk lebih kompetitif di pasar global. bahwa strategi dalam pemanfaatan teknologi yaitu ada 31 alat teknologi yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha muda, dan mereka juga memonitoring terlebih dahulu baik dari pelatihan manajemen dari segi produknya, segi manajemen pembelanjannya dan dari segi manajemen pemasarannya, dan dari situlah bagian dari manajemennya mendigitalisasi mengenai jalannya sosialisasi mengenai pemanfaatan teknologi tersebut.

Figure/ Gambar 2. Pelatihan Strategi Penjualan Online dan Offline



Source / Sumber : Arsip Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial hanya fokus memberikan bantuan, bantuannya itu dapat diberikan berdasarkan dari permintaan proposal dari pemohon yang ingin dibantu dan untuk mengenai evaluasi secara teratur dan terinci itu tidak ada karena fokus dari

Dinas Sosial ialah memberikan bantuan sesuai dengan permintaan yang diajukan namun sejauh ini Dinas Sosial belum ada yang meminta bantuan tentang akses pemasaran (katalisator), tetapi Dinas Sosial pun bersifat terbuka terhadap masyarakat yang ingin dibantu dalam memasarkan produk jualannya karena tergantung dari masyarakatnya strategi seperti apa yang mereka buat untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dan dalam melaksanakan perannya Dinas UMKM tidak hanya berperan dalam pemberian modal tetapi juga memberikan pelatihan dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan teknologi dalam akses pemasaran usahanya. Berdasarkan teori Ryaas Rasyid, (2010) dalam Muhamadam Labolo Peran Pemerintah Sebagai Katalisator belum berjalan sesuai dengan harapan karena masih berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara bersama masyarakat, masih ada masyarakat yang belum memahami tentang bagaimana cara memanfaatkan teknologi dalam memasarkan usaha mereka melalui media sosial dan dapat saya simpulkan bahwa dari keempat indikator berdasarkan teori Ryaas Raysid (2010) dalam Muhadam Labolo hanya satu indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu indikator peran pemerintah dalam akses dan pemasaran UMKM (Katalisator) sehingga perlu menjadi pertimbangan pemerintah kota palu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, peneliti menarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, peran Pemerintah Kota Palu dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Evaluasi terhadap empat peran pemerintah—sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator—menunjukkan bahwa dari hasil wawancara dengan lima narasumber, termasuk dua dari dinas terkait dan tiga dari masyarakat, tiga peran pemerintah telah berjalan sesuai harapan. Namun, peran sebagai Katalisator masih belum maksimal, karena tidak semua masyarakat memahami cara menggunakan media sosial dan teknologi untuk

memasarkan produk mereka. Oleh karena itu, meskipun tiga peran pemerintah telah memenuhi harapan, peran sebagai Katalisator memerlukan peningkatan. Diharapkan Pemerintah Kota Palu, melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, serta Dinas Sosial, dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha mereka. Berdasarkan wawancara, masih banyak masyarakat yang belum memahami akses pemasaran UMKM yang telah disosialisasikan oleh pihak terkait. Sebaiknya, Pemerintah Kota Palu terus mencari solusi untuk masalah ini, misalnya dengan meningkatkan sosialisasi tentang penggunaan teknologi dan media sosial, serta strategi pengembangan UMKM. Dengan upaya tersebut, diharapkan perekonomian Kota Palu akan membaik dan tingkat pengangguran akan menurun.

Referensi

- Anugerah, F. N., & Nuraini, I. (2021). Peran UMKM dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1).
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Pustaka Setia, 1689–1699.
- Arsip Foto Pelatihan Berbasis Online maupun Offline Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota palu
- Buku Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. Letkol (Mar) Dr. MS. Noorman, SSos, MTr. Oprsla, M.Tr.Han *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA* Cetakan Pertama: September 2018
- Diva, Gede. 2009, Nawangsari et al., (2021) . *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanis (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2),
- Fadhilah Ramadhani, Yaenal Arifin, *Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*

- Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015, (Jurnal: *Economics Development Analisis Journal*. Edaj 2 {2}, 2013), 136.
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- Halim, A., Loneragan, N. R., Wiryawan, B., Fujita, R., Adhuri, D. S., Hordyk, A. R., & Sondita, M. F. A. (2020). Transforming traditional management into contemporary territorial-based fisheries management rights for small-scale fisheries in Indonesia. *Marine Policy*, 116, 103923.
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Indonesia, R. (2013) Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2013), 01.
- Jurnal jihan Salsabila, Jauhar Arifin. Erwan Mardani 2020, peran pemerintah desa dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol 3 No. 1 2020.
- Marsh, D., Stoker, G., & Mahadi, H. (2021). *Institusi dan Gagasan: Seri Teori dan Metode Ilmu Politik*. Nusamedia.
- M. Ibnu Fadhil, Peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung, 2017. <http://digilib.unila.ac.id>. (Diakses Rabu, 29 November 2023).
- Muh Nurdin¹, St Nurmaeta¹, Muhammad Tahir² Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa

Nur Wanita istiqra, jurnal Penelitian Ilmiah, vol.3 No 2 Desember 2015 IAIN *palu dosen fakultas syari'ah IAIN palu*

Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim, Saleh Soeaidy. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu). *Jurnal Wacana*-Vol. 17, No. 2. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2014.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bagian Kedua pasal 30

Rasyid, M. Ryaas. 2010. Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. Jakarta: mutiara sumber widya.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Syakir Sofyan & Ahmad Arief *jurnal Bilancia*, Vol.11 No, 2 juli-Des 2017.